



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.24/MEN/2010
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan dan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010.**
- PERTAMA : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2009, yang selanjutnya disebut Program Legislasi KKP 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Program Legislasi KKP 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA memuat daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi prioritas penyusunan untuk ditetapkan pada Tahun 2010.
- KETIGA : Peraturan perundang-undangan yang belum dapat ditetapkan pada Tahun 2010, penetapannya dilanjutkan pada Tahun 2011.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R. I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor KEP.24/MEN/2010
Tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan
dan Perikanan Tahun 2010

**PROGRAM LEGISLASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2010**

No	JENIS PERATURAN	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
A. PERATURAN PEMERINTAH			
1.	Peraturan Pemerintah	Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	Proses pembahasan di Kementerian Keuangan
2.	Peraturan Pemerintah	Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K
3.	Peraturan Pemerintah	Kapal Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
4.	Peraturan Pemerintah	Tata Pemanfaatan Air dan Lahan Pembudidayaan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya
5.	Peraturan Pemerintah	Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum dan Pihak yang Berjasa di Bidang Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen P2SDKP
6.	Peraturan Pemerintah	Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen P2HP
7.	Peraturan Pemerintah	Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar	Proses pembahasan di Kementerian Sekretariat Negara
8.	Peraturan Pemerintah	Mitigasi Bencana dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Proses pembahasan di Kementerian Sekretariat Negara
9.	Peraturan Pemerintah	Pengawasan Perikanan	Proses pembahasan di Kementerian Hukum dan HAM
10.	Peraturan Pemerintah	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan	Draft dipersiapkan oleh BPSDMKP
B. PERATURAN PRESIDEN			
1.	Peraturan Presiden	Batas Sempadan Pantai	Draft dipersiapkan oleh Ditjen KP3K
2.	Peraturan Presiden	Rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Draft dipersiapkan oleh Ditjen KP3K
3.	Peraturan Presiden	Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Draft dipersiapkan oleh Ditjen KP3K
4.	Peraturan Presiden	Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terpadu pada Tingkat Nasional	Draft dipersiapkan oleh Ditjen KP3K
5.	Peraturan Presiden	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.	Draft dipersiapkan oleh BPSDMKP
6.	Peraturan Presiden	Batas Usia Pensiun Jabfung Penyuluh Perikanan.	Draft dipersiapkan oleh BPSDMKP
7.	Peraturan Presiden	Tunjangan Profesi Penyuluh Perikanan	Draft dipersiapkan oleh BPSDMKP

No	JENIS PERATURAN	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
8.	Peraturan Presiden	Penelitian dan Pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Draft dipersiapkan oleh BRKP
9.	Peraturan Presiden	Penerimaan (Acceptance) Agreement to Promote Compliance With International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas 1993	Draft dipersiapkan oleh Biro Hukum dan Organisasi
C. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1.	Peraturan Menteri	Produktivitas Kapal Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
2.	Peraturan Menteri	Penataan Daerah Jalur dan Waktu atau Musim Penangkapan Ikan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
3.	Peraturan Menteri	Rencana Pengelolaan Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
4.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Pengkayaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
5.	Peraturan Menteri	Tugas Pemantauan Perikanan di Atas Kapal Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
6.	Peraturan Menteri	Skala Usaha Di Bidang Penangkapan Ikan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
7.	Peraturan Menteri	Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
8.	Peraturan Menteri	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
9.	Peraturan Menteri	Mekanisme Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Sebagai Pengelola Pelabuhan Perikanan Dengan Instansi Terkait di Pelabuhan Perikanan.	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
10.	Peraturan Menteri	Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
11.	Peraturan Menteri	Jenis, Jumlah, Ukuran dan Penempatan Alat bantu Penangkapan Ikan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
12.	Peraturan Menteri	Persyaratan atau Standar Prosedur Operasional Penangkapan Ikan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
13.	Peraturan Menteri	Ukuran atau Berat Minimum Jenis Ikan Yang Boleh Ditangkap	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
14.	Peraturan Menteri	Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
15.	Peraturan Menteri	Tata Cara dan Syarat-syarat Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
16.	Peraturan Menteri	Pembangunan, pengimporan, pemodifikasian kapal perikanan, pengukuran, pemberian tanda pengenal kapal serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap

No	JENIS PERATURAN	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
17.	Peraturan Menteri	Klasifikasi Pelabuhan Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
18.	Peraturan Menteri	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
19.	Peraturan Menteri	Persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
20.	Peraturan Menteri	Pengenaan sanksi administrative bagi kapal perikanan berbendera asing yang tidak menggunakan anak buah kapal berkewarga negaraan Indonesia	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
21.	Peraturan Menteri	Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2002 tentang Penyediaan, Peredaran, Penggunaan Dan Pengawasan Obat Ikan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya
22.	Peraturan Menteri	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya
23.	Peraturan Menteri	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya
24.	Peraturan Menteri	Pedoman Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya
25.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen P2SDKP
26.	Peraturan Menteri	Surat Laik Operasi Kapal	Draft dipersiapkan oleh Ditjen P2SDKP
27.	Peraturan Menteri	Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang Menangani Pengawasan dan Pengendalian Guna Terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Draft dipersiapkan oleh Ditjen P2SDKP
28.	Peraturan Menteri	Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Draft dipersiapkan oleh Ditjen P2SDKP
29.	Peraturan Menteri	Praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran	Draft dipersiapkan oleh Ditjen P2HP
30.	Peraturan Menteri	Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Dimasukkan ke Dalam Wilayah Republik Indonesia	Draft dipersiapkan oleh Ditjen P2HP
31.	Peraturan Menteri	Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen KP3K
32.	Peraturan Menteri	Tata Cara Perlindungan Jenis dan Genetik Ikan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen KP3K
33.	Peraturan Menteri	Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen KP3K
34.	Peraturan Menteri	Pemeliharaan Ikan yang dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tidak dilindungi	Draft dipersiapkan oleh Ditjen KP3K
35.	Peraturan Menteri	Kemitraan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen KP3K

No	JENIS PERATURAN	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
36.	Peraturan Menteri	Tata Cara Penandaan Induk Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan yang dilindungi dan Jenis Ikan yang Tidak dilindungi	Draft dipersiapkan oleh Ditjen KP3K
37.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Proses Pembahasan di Kementerian PAN
38.	Peraturan Menteri	Sistem Standar Mutu (QSS) Pendidikan, Pelatihan,Ujian dan Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan	Draft disiapkan oleh BPSDMKP
39.	Peraturan Menteri	Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan	Draft disiapkan oleh BPSDMKP
40.	Peraturan Menteri	Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Draft disiapkan oleh BPSDMKP
41.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/ inpassing ke dlm Jabfung Penyuluh Perikanan	Proses Pembahasan di Biro Hukum dan Organisasi
42.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan & Angka Kreditnya	Proses Pembahasan di Biro Hukum dan Organisasi
43.	Peraturan Menteri	Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan	Proses Pembahasan di Biro Hukum dan Organisasi
44.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Penyusunan Program Penyuluhan	Proses Pembahasan di Biro Hukum dan Organisasi
45.	Peraturan Menteri	Pedoman Formasi Penyuluh Perikanan (<i>bezetting</i>)	Proses Pembahasan di Biro Hukum dan Organisasi
46.	Peraturan Menteri	Kebijakan & Strategi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Draft disiapkan oleh BPSDMKP
47.	Peraturan Menteri	Pengawasan & Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Draft disiapkan oleh BPSDMKP
48.	Peraturan Menteri	Mekanisme Kerja & Metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Draft disiapkan oleh BPSDMKP
49.	Peraturan Menteri	Standar Akreditasi & Kompetensi Ketenagaan Penyuluh Perikanan	Draft disiapkan oleh BPSDMKP
50.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Pemanfaatan Sarana & Prasarana Penyuluhan Perikanan	Draft disiapkan oleh BPSDMKP
51.	Peraturan Menteri	Penerapan Rekomendasi Teknologi dlm Penyuluhan Perikanan	Draft disiapkan oleh BPSDMKP
52.	Peraturan Menteri	Sistem Informasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan	Draft disiapkan oleh BPSDMKP
53.	Peraturan Menteri	Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis	Draft disiapkan oleh BRKP
54.	Peraturan Menteri	Perizinan Penelitian dan Pengembangan	Draft disiapkan oleh BRKP
55.	Peraturan Menteri	Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Pengolahan dan Analisis Data dan Sampel Perikanan di Luar Negeri	Draft disiapkan oleh BRKP
56.	Peraturan Menteri	Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2011	Draft dipersiapkan oleh Biro Perencanaan
57.	Peraturan Menteri	Pelimpahan Urusan dan Penugasan Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Draft dipersiapkan oleh Biro Perencanaan

No	JENIS PERATURAN	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
58.	Peraturan Menteri	Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara dan Bukan Bendahara	Draft dipersiapkan oleh Biro Keuangan
59.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Biro Hukum dan Organisasi
60.	Peraturan Menteri	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Biro Umum dan Perlengkapan
61.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Standarisasi Sarana dan Prasarana Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Biro Umum dan Perlengkapan
62.	Peraturan Menteri	Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Kehumasan	Draft dipersiapkan oleh PUSDATIN
63.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Penyelenggaraan Data dan Statistik	Draft dipersiapkan oleh PUSDATIN
64.	Peraturan Menteri	Jenis, Tata Cara Penerbitan, dan Format Dokumen Tindakan karantina Ikan	Draft dipersiapkan oleh PUSKARI
65.	Peraturan Menteri	Instalasi Dan Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan	Draft dipersiapkan oleh PUSKARI
66.	Peraturan Menteri	Tindakan Karantina Ikan dalam Hal Transit	Draft dipersiapkan oleh PUSKARI
67.	Peraturan Menteri	Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Media Pembawa Yang Tergolong Benda Lain Berupa Bahan Patogenik dan Bahan Biologik	Draft dipersiapkan oleh PUSKARI
68.	Peraturan Menteri	Kewajiban Tambahan pada Tindakan Karantina Ikan	Draft dipersiapkan oleh PUSKARI
69.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan	Draft dipersiapkan oleh PUSKITA
D. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1.	Keputusan Menteri	Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2005 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Inspektorat Jenderal
2.	Keputusan Menteri	Pengangkatan Petugas Pemantau Perikanan Di Atas Kapal Perikanan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
3.	Keputusan Menteri	Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagaian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
4.	Keputusan Menteri	Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	Draft dipersiapkan oleh Ditjen KP3K
5.	Keputusan Menteri	Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional	Draft disiapkan oleh BPSDMKP
6.	Keputusan Menteri	Pedoman Standar Kualifikasi & Kompetensi Guru & Dosen	Draft disiapkan oleh BPSDMKP
7.	Keputusan Menteri	Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pelaut Perikanan	Draft disiapkan oleh BPSDMKP
8.	Keputusan Menteri	Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Draft dipersiapkan oleh BPSDMKP
9.	Keputusan Menteri	Jenis dan Jenjang Pelatihan Non Aparatur	Draft dipersiapkan oleh BPSDMKP

No	JENIS PERATURAN	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
10.	Keputusan Menteri	Pakaian Seragam, Tanda Pengenal dan Atribut Bagi Peserta Didik dan Pembina pada Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Draft dipersiapkan oleh BPSDMKP
11.	Keputusan Menteri	Pedoman Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)	Draft dipersiapkan oleh Biro Perencanaan
12.	Keputusan Menteri	Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina	Draft dipersiapkan oleh PUSKARI
13.	Keputusan Menteri	Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Hama Dan Penyakit Ikan Karantina	Draft dipersiapkan oleh PUSKARI

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf